

REVISI

# PERJANJIAN KINERJA 2020

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, kami akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Jakarta, Juli 2020

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,71 Poin
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	16,28 Persen
		Penurunan Laju Deforestasi	0,44 Juta Ha
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	61 Poin
		Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	56 Ribu Ha
		Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi ( <i>High Conservation Values</i> )	3.343.114 Ha
b.	Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional	103 Triliun Rupiah
		Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	US\$ 12 Miliar
		Peningkatan Nilai PNBPFungsional KLHK	5,1 Triliun Rupiah
c.	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	0,5 Juta Ha
		Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	46.500 Ha
		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	125 Ribu Ha
d.	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	2,1 Poin
		Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	153 Kasus
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,50 Poin
		Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	18 Produk
		Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	70 Poin
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	77 Poin
		Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	1 Opini WTP
		Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3

Jakarta, Juli 2020  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Program	Pagu Awal (x Rp.1000,-)	Penghematan	Pagu Akhir (x Rp.1000,-)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	592.759.666	102.646.256	490.113.410
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	86.966.609	32.352.885	54.613.724
3.	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	301.754.834	66.587.036	235.167.798
4.	Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung	2.799.916.214	1.000.000.000	1.799.916.214
5.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2.049.226.996	389.919.379	1.659.307.617
6.	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	480.427.464	130.420.000	350.007.464
7.	Penelitian dan Pengembangan LHK	393.833.245	20.190.138	373.643.107
8.	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	341.386.089	65.099.703	276.286.386
9.	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	458.679.200	127.729.630	330.949.570
10.	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	468.790.771	155.125.000	313.665.771
11.	Pengendalian Perubahan Iklim	313.272.831	65.283.963	247.988.868
12.	Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan B3	361.844.139	100.375.762	261.468.377
13.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	670.467.758	283.981.110	386.486.648
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.319.325.816</b>	<b>2.539.710.862</b>	<b>6.779.614.954</b>

Jakarta, Juli 2020

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

  
Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemegang Izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	30 Persen
b.	Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1.020.000 Hektar
c.	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	153 Kasus
d.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	72 Poin

**No. Program/ Kegiatan**

**Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH).
3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Anggaran(x Rp.1000,-)**  
**313.665.771**

Jakarta, Juni 2020

MENTERI  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN



Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM  
 NIP. 19660711 199203 1 018



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Sekertaris Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum LHK

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si  
NIP. 19630705 198303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**  
**HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75 Poin
		Nilai Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 Poin
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tertib dan Akuntabel	1 Laporan
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

**Kegiatan**

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I  
 Layanan Sarana dan Prasarana Internal  
 Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK  
**Total**

**Anggaran**

Rp. 10.526.315.000,-  
 Rp. 2.339.700.000,-  
Rp. 34.347.561.000,-  
**Rp. 47.213.576.000,-**

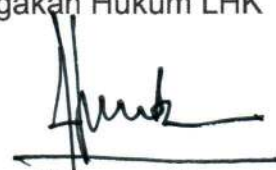
Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM  
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
 Sekertaris Direktorat Jenderal  
 Penegakan Hukum LHK



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si  
 NIP. 19630705 198303 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

Jabatan : Plt. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Plt. Direktur Pengaduan,  
Pengawasan dan Sanksi  
Administrasi

  
Jasmin Ragil Utomo, SH, MM  
NIP. 19640603 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN dan SANKSI ADMINISTRASI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran Direktorat PPSA	1 Layanan
2	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	263 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	180 Orang

Anggaran

Menjadi

1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 1.096.100.000,-
2.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp 15.268.000.000,-
		Rp 16.364.100.000,-

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,  
 Plt. Direktur Pengaduan,  
 Pengawasan dan Sanksi  
 Administrasi



4 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
 NIP 19660711 199203 1 018



Jasmin Ragil Utomo, SH, MM  
 NIP. 19640603 199203 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Nurhuda, S.H., M.A

Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Direktur Penegakan Hukum Pidana

Yazid Nurhuda, S.H., M.A  
NIP 19681209 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	10 Kasus
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	130 Orang

**Kegiatan**

		Menjadi
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 1.161.379.000,-
2.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 13.524.280.000,-
		Rp 13.685.659.000,-

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP 19660711 199203 1 018

4

Pihak Pertama,  
Direktur Penegakan Hukum Pidana



Yazid Nurhuda, S.H., M.A  
NIP 19681209 199303 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Direktur Penyelesaian Sengketa  
Lingkungan Hidup,

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM  
NIP. 19640603 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORAT PENYELESAIAN SENKETA LINGKUNGAN HIDUP**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	1 Layanan
2	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	23 Kasus

1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ;	Rp.	733.930.000,-
2.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ;	Rp.	11.461.000.000,-
	Total	Rp.	12.194.930.000,-

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK,

  
 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
 NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
 Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,

  
 Jasmin Ragil Utomo, SH, MM  
 NIP. 19640603 199203 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

Jabatan : Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Direktur Pencegahan dan  
Pengamanan Hutan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si  
NIP. 19620621 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Layanan
2	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	350.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	12 Operasi

**Kegiatan:**

1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ;	Rp.	1.468.080.000,-
2.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp.	23.927.263.000,-
	<b>Total</b>	Rp.	<b>25.395.343.000,-</b>

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com, MPM  
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
 Direktur Pencegahan dan  
 Pengamanan Hutan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si  
 NIP. 19620621 199002 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eduward Hutapea, S.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Kepala Balai PPH LHK  
Sumatera



Eduward Hutapea, S.Si  
NIP. 19690406 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
WILAYAH SUMATERA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Semula
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	200.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	16 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	91 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	45 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	3 Orang

**Kegiatan :**

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Anggaran**

Rp. 28.538.401.000,-  
Rp. 8.383.922.000,-  
Rp. 4.399.475.000,-  
Rp. 9.478.007.000,-

**Total Anggaran**

**Rp. 50.799.805.000,-**

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM 4  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Edward Hutapea, S.Si  
NIP. 19690406 199903 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Muhammad Nur, M.S.P

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Kepala Balai PPH LHK  
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Ir. Muhammad Nur, M.S.P  
NIP. 19670727 199703 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	110.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	113 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	15 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	3 Orang

**Anggaran :**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | Rp. 25.749.427.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                      | Rp. 8.661.575.000,-  |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi             | Rp. 4.131.370.000,-  |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan                | Rp. 5.884.598.000,-  |

**Total Anggaran**

**Rp. 44.426.970.000,-**

Jakarta, 28 Agustus 2020

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
 Kepala Balai PPH LHK  
 Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Ir. Muhammad Nur, M.S.P  
 NIP. 19670727 199703 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan, S.Hut, M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Kepala Balai PPH LHK  
Wilayah Kalimantan



Subhan, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730320 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
WILAYAH KALIMANTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	160.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	14 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	51 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	30 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	1 Orang

**Anggaran:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | Rp. 22.167.291.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                      | Rp. 9.255.521.000,-  |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi             | Rp. 3.018.989.000,-  |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan                | Rp. 8.265.959.000,-  |

**Total Anggaran**

**Rp. 42.707.760.000,-**

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Kepala Balai PPH LHK  
Wilayah Kalimantan



Suhana S. Hut, M.Si  
NIP. 19730320 199903 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Kepala Balai PPH LHK  
Wilayah Sulawesi

Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H  
NIP. 19751206 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**WILAYAH SULAWESI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Semula
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	100.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	14 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	23 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	23 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	2 Orang

**Kegiatan :**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | Rp. 20.142.847.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                      | Rp. 4.988.405.000,-  |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi             | Rp. 1.387.044.000,-  |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan                | Rp. 8.112.678.000,-  |

**Total Anggaran**

**Rp. 34.630.974.000,-**

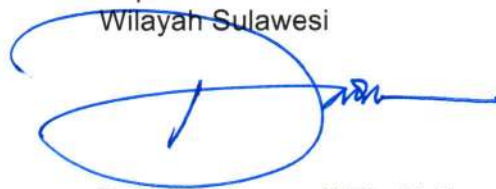
Jakarta, Agustus 2020

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
 Kepala Balai PPH LHK  
 Wilayah Sulawesi



Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H  
 NIP. 19751206 199803 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
Kepala Balai PPH LHK  
Wilayah Maluku Papua



Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19750610 200003 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**WILAYAH MALUKU PAPUA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;	100.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	8 Operasi
3	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	9 Perusahaan
4	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	7 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	1 Orang

**Kegiatan :**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | Rp. 15.993.357.000,- |
| 2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                      | Rp. 4.584.887.000,-  |
| 3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi             | Rp. 1.409.990.000,-  |
| 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan                | Rp. 3.258.420.000,-  |

**Total Anggaran**

**Rp. 25.246.654.000,-**

Jakarta, 28 Agustus 2020

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,  
 Kepala Balai PPH LHK  
 Wilayah Maluku Papua



Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.  
 NIP. 19750610 200003 1 002





Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan

**2020**